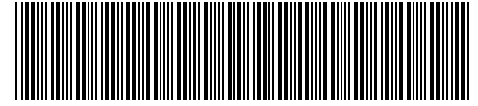




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.099126/2026**



DS:0070-6054-7066-0960

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 3. Provinsi : (03) JAWA TENGAH
 4. Kode>Nama Satker : (099126) PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
- Sebesar : Rp. 131.440.000 (SERATUS TIGA PULUH SATU JUTA EMPAT RATUS EMPAT PULUH RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 131.440.000
Rp. 131.440.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 131.440.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNBP | Rp. | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - PNBP TA Berjalan | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| | | | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SBSN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN PURWOKERTO (029) Rp. 131.440.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.

Jakarta, 01 Desember 2025
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099126/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0070-6054-7066-0960

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (099126) PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Halaman : I A. 1

Program	: 005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	131.440.000
Kegiatan	: 1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	131.440.000
Indikator Kinerja Kegiatan	: 1. 01	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum	
	: 2. 01	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	
	: 3. 01	Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	
	: 4. 01	Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Umum	
	: 5. 01	Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Umum	
	: 6. 01	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara di lingkungan Peradilan Umum	
	: 7. 02	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu tingkat pertama di lingkungan peradilan umum	
	: 8. 02	Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	
	: 9. 02	Jumlah perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Umum	
	: 10. 03	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum	
	: 11. 04	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 12. 05	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 13. 06	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum	
	: 14. 07	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan umum	
	: 15. 08	Jumlah Pelaksanaan Penyelesaian Permohonan eksekusi putusan perdata pada lingkungan peradilan umum	
	: 16. 09	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan umum	
	: 17. 10	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil melalui mediasi	
	: 18. 11	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara anak yang berhasil melalui diversi	
	: 19. 12	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court	
	: 20. 13	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099126/2026
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:0070-6054-7066-0960

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (099126) PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Halaman : I A. 2

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

- 21. 14 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu)
- 22. 15 Jumlah Pelaksanaan Koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di pengadilan yang menggunakan e-Court

Klasifikasi Rincian Output	1	:	1049.AEA	Koordinasi	2,00	kegiatan	1.500.000
Rincian Output	:	01	AEA.001	Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Aparatur Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Umum	2,00	kegiatan	1.500.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	150,00	Perkara, Berkas Perkara	90.000.000
Rincian Output	:	01	BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	150,00	Perkara	90.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	100,00	Orang	28.000.000
Rincian Output	:	01	QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	100,00	Orang	28.000.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan	28,00	Perkara, Berkas Perkara	11.940.000
Rincian Output	:	01	QCA.001	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara (PN)	4,00	Perkara	540.000
			02	QCA.002 Sidang di luar Gedung Pengadilan (PN)	24,00	Perkara	11.400.000

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

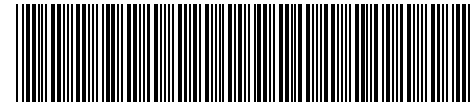
ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2026

NOMOR : DIPA- 005.03.2.099126/2026

I B. SUMBER DANA



DS:0070-6054-7066-0960

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 Provinsi : (03) JAWA TENGAH
 Kode>Nama Satker : (099126) PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

		Pagu	Ekuivalen Rupiah		
1. Anggaran Tahun 2026	Rp.	131.440.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
1. Rupiah Murni	Rp.	131.440.000		(2) RPLN	US\$ 0 Rp. 0
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$ 0 Rp. 0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$ 0 Rp. 0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR 0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR 0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR 0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR 0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099126/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0070-6054-7066-0960

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (099126) PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
099126	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	-	131.440	-	-	-	131.440		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	131.440	-	-	-	131.440		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	131.440	-	-	-	131.440		
1049.AEA	Koordinasi (03.17 JAWA TENGAH / KAB. PURBALINGGA)	-	1.500	-	-	-	1.500	03 . 17	
01	RM	-	1.500	-	-	-	1.500	029	
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (03.17 JAWA TENGAH / KAB. PURBALINGGA)	-	90.000	-	-	-	90.000	03 . 17	
01	RM	-	90.000	-	-	-	90.000	029	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (03.17 JAWA TENGAH / KAB. PURBALINGGA)	-	28.000	-	-	-	28.000	03 . 17	
01	RM	-	28.000	-	-	-	28.000	029	
1049.QCA	Perkara Hukum Perseorangan (03.17 JAWA TENGAH / KAB. PURBALINGGA)	-	11.940	-	-	-	11.940	03 . 17	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099126/2026
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:0070-6054-7066-0960

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (099126) PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	
01	RM	-	11.940	-	-	-	11.940	029	
JUMLAH		-	131.440	-	-	-	131.440		

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099126/2026
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:0070-6054-7066-0960

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (03) JAWA TENGAH
Kode>Nama Satker : (099126) PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	099126	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA													
		RENCANA PENARIKAN DANA	9.831	9.831	9.831	10.581	9.831	10.716	9.831	9.966	9.831	9.831	9.831	21.529	131.440
		BELANJA BARANG	9.831	9.831	9.831	10.581	9.831	10.716	9.831	9.966	9.831	9.831	9.831	21.529	131.440
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	9.831	9.831	9.831	10.581	9.831	10.716	9.831	9.966	9.831	9.831	9.831	21.529	131.440
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	9.831	9.831	9.831	10.581	9.831	10.716	9.831	9.966	9.831	9.831	9.831	21.529	131.440
		PERKIRAAN PENERIMAAN	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.692	1.725	20.337
		- PNB (425231)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10
		- PNB (425232)	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	41	49	500
		- PNB (425233)	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	526	534	6.320
		- PNB (425239)	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125	1.132	13.507

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099126/2026
IV A. B L O K I R**



DS:0070-6054-7066-0960

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [099126] PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

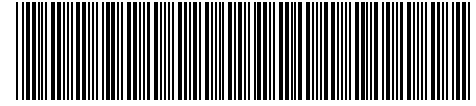
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2026
NOMOR : DIPA- 005.03.2.099126/2026
IV B. C A T A T A N**



DS:0070-6054-7066-0960

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [03] JAWA TENGAH
Kode dan Nama Satker : [099126] PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 01 Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002